

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Evaluasi selalu diperlukan setelah program dan kebijakan diimplementasikan. Tanpa evaluasi, sebuah kebijakan atau program tidak akan sempurna, tidak peduli seberapa bagus, atau hebatnya kebijakan atau program tersebut. Oleh karena itu, evaluasi, program, dan kebijakan sebenarnya merupakan komponen yang saling bergantung dan tidak terpisahkan.

Penilaian sebagai salah satu komponen dan elemen penting mengasumsikan bagian penting dalam menentukan perkembangan dan dukungan sebuah strategi dan program, bahkan penilaian memainkan atau mengasumsikan bagian penting dalam mengevaluasi pengaturan, memutuskan hasil dan dampak (hasil), kualitas, keuntungan, dan manfaat pelaksanaan atau eksekusi sebuah pendekatan atau program, terutama dalam perencanaan kota dan wilayah.

Stufflebeam dalam Kirkpatrick (1998), mengemukakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan (*Fernandes dalam Muchsin dan Putra (2002)*) proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi (*Djaali dan Mulyono dalam Yusuf, 2005*) proses memahami, memberi arti, mendapatkan dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan pengambil keputusan” (*Sukardi dalam Widoyoko, 2010*) sebagai kegiatan untuk mengumpulkan informasi mengenai bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan” (*Arikunto dan Abdul Jabar, 2010*).

Evaluasi program merupakan penerapan model, teknik dan pengetahuan tentang evaluasi, untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, pelaksanaan dan efektivitas program secara sistematis (*Langbein & Felbinger (2006)* dalam *Tayibnapis, 2008:3*). Evaluasi program adalah suatu kegiatan yang membutuhkan metode ilmiah untuk mengukur implementasi dan hasil program dengan tujuan untuk membuat keputusan (*Rutman dalam Tayibnapis, 2000:12*). Program harus diakhiri dengan evaluasi, guna memastikan apakah program tersebut berhasil menjalankan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada tiga tahap rangkaian evaluasi program yaitu: 1) menyatakan pertanyaan serta menspesifikasikan informasi yang hendak diperoleh, 2) mencari data yang relevan dengan penelitian, dan 3) menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak pengambil

keputusan untuk melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan program tersebut (*Issac dan Michael dalam Tayibnapis, 2008*).

Sehubungan dengan persoalan evaluasi tersebut, salah satu aspek yang bersifat penting, vital dan strategis dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik khususnya di Indonesia adalah penanganan permukiman kumuh (*slum's settlement management*) terutama di daerah perkotaan. Konsepsi permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan). Permukiman kumuh sebagai daerah slum yang bukan saja dari segi fisik tetapi juga dari segi sosial (*Bergel dalam Wirotomo, 1997*). Permukiman kumuh merupakan suatu kawasan dengan bentuk hunian yang tidak terstruktur, tidak berpola (misalnya letak rumah dan jalannya tidak beraturan, tidak tersedianya fasilitas umum, prasarana dan sarana air bersih, dan MCK), bentuk fisiknya yang tidak layak misalnya secara reguler mengalami banjir tiap tahunnya (*Santosa, 2007*).

Permukiman kumuh dipandang sebagai permukiman atau perumahan bagi orang-orang miskin perkotaan yang berpenduduk padat, terdapat dipinggir-pinggir jalan atau lorong-lorong yang kondisinya kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan atau disebut wilayah pencemaran (*Suparlan dalam Putro, 2011:22*). Permukiman kumuh dianggap sebagai tempat dimana mayoritas anggota masyarakat kota berpenghasilan rendah dengan membentuk permukiman tempat tinggal dalam kondisi minim (*Adisasmita, 2005*).

Perkembangan lingkungan permukiman kumuh dan padat yang biasanya terjadi di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk kota itu sendiri maupun karena faktor urbanisasi. Dampak negatif urbanisasi yang telah berlangsung selama ini disebabkan oleh tidak seimbangnya peluang untuk mencari nafkah di daerah pedesaan, sehingga memunculkan adanya daya tarik kota yang dianggap mampu memberikan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan atau luar kota, sementara latar belakang kapasitas dan kemampuan para pendatang sangat marjinal seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan, maka kebutuhan akan penyediaansarana dan prasarana permukiman juga akan meningkat, baik melalui peningkatan lahan maupun pembangunan baru.

Usaha Pemerintah dalam menangani permukiman kumuh (*slum area*) salahsatunya dialkukan dengan program Kotaku. Hal tersebut tertulis dalam Surat Edaran Kementerian PUPR No: 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh. Program KOTAKU ini dilaksanakan secara nasional di 269 Kota/Kabupaten 34 Provinsi. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pada kawasan kumuh melalui kegiatan

pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi guna keberlanjutan masyarakat dipermukiman kumuh.

Dari data kekumuhan sebelum adanya program KOTAKU Kota Pasuruan terutama Kelurahan Tambaan yaitu 14.85% kondisi bangunan, 45.48% kondisi penyediaan air minum, 25.24% kondisi drainase lingkungan, 77.78% kondisi Pengelolaan Persampahan dan 78.96 kondisi proteksi kebakaran dengan nilai 37 untuk kekumuhanya. Kota Pasuruan adalah Ibukota Pasuruan, Jawa Timur dengan luas wilayah 35,29 Km. Ditinjau dari segi transportasi darat, saat ini Kota Pasuruan berada pada posisi strategis yaitu terletak di persimpangan jalur regional Surabaya-Probolinggo-Malang, serta termasuk dalam rencana jalan nasional arteri primer Surabaya-Sidoarjo-Gempol-Pasuruan-Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi.

Kondisi ini merupakan potensi yang sangat menguntungkan bagi perkembangan kota. Perkembangan Kota Pasuruan, selain berpengaruh terhadap bagian dalam kota, secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap kawasan pinggiran kota dan kota-kota yang ada disekitarnya. Namun data awal di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan di Kota Pasuruan belum merata, dimana pada bagian utara kota masih dapat ditemui kondisi sosial ekonomi masyarakat dan prasarana sarana perumahan permukimannya masih tertinggal, salah satunya adalah Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo. Alasan mengambil kelurahan Tambaan karena lokasi tersebut termasuk kekumuhan tertinggi di bandingkan kelurahan – kelurahan yang di program kan Kotaku di Kota Pasuruan seperti Kelurahan Bugulor dengan nilai 25 (Kekumuhan ringan) dan Kelurahan Panggungrejo dengan nilai kekumuhanya 33 sedangkan Kelurahan Tambaan sendiri kekumuhanya memperoleh nilai 37 terutama dilihat dari eksisting Kelurahan Tambaan masih banyak kekurangan Air bersihnya dan kondisi Drainase yang kurang baik

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya maka dapatdirumuskan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tambaan?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, Tujuan dan sasaran penelitian ini sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu Terevaluasinya keberhasilan program Kotaku menurut persepsi Masyarakat Kelurahan Tambaan Kota Pasuruan

1.3.2 Sasaran

Untuk mengetahui Evaluasi Program Kotaku untuk penanganan permukiman kumuh, maka sasaran dalam penelitian ini adalah :

1. Identifikasi Program dan Pelaksanaan Kotaku di Kelurahan Tambaan Kota Pasuruan
2. Mengetahui Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Tambaan Kota Pasuruan
3. Evaluasi Keberhasilan Kotaku di Kelurahan Tambaan Kota Pasuruan.

1.4 Ruang Lingkup

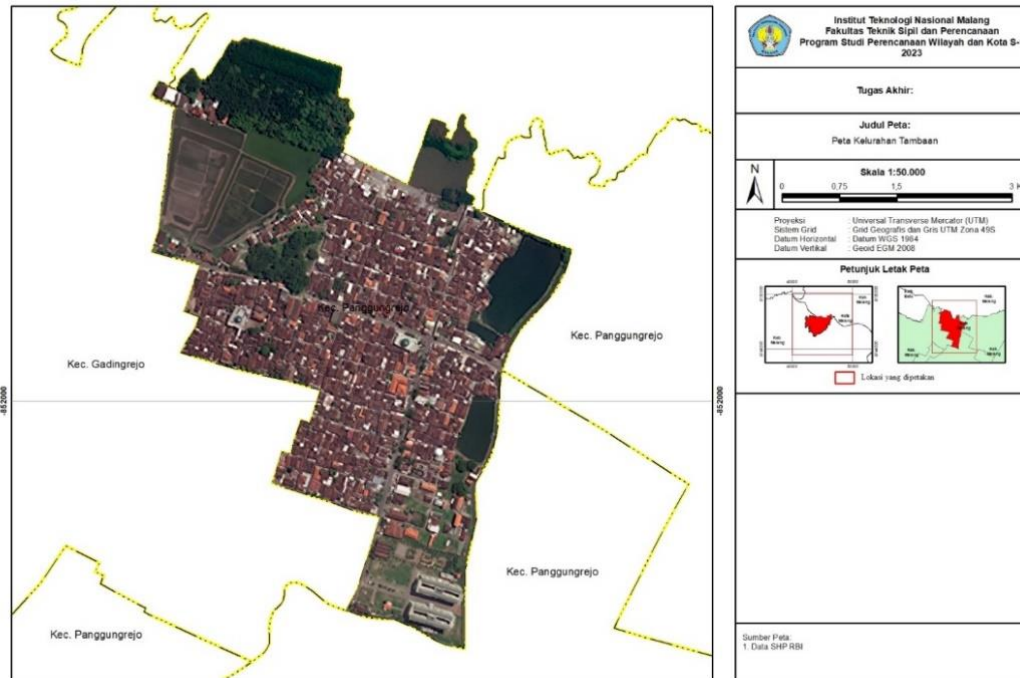
Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari 2 hal, yaitu ruang lingkup lokasi dan ruang lingkup materi.

1.4.1 Ruang Lingkup Lokasi

Kelurahan Tamba'an berada di sebelah utara Kota Pasuruan, daerah pesisir dengan potensi wisata mangrove yang belum dikembangkan dengan baik. Memiliki batas - batas wilayah :

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Kelurahan Ngemplakrejo
- Sebelah Selatan : Kelurahan Trajeng
- Sebelah Barat : Kelurahan Gadingrejo

Kelurahan Tamba'an memiliki : 24 RT dan 5 RW (1.286 Kepala Keluarga), untuk lebih jelas dapat di lihat dari peta batas administrasi berikut



Peta 1. 1 Peta Batas Administrasi

1.4.1 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini meliputi indentifikasi Pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Tambaan, Mengetahui persepsi masyarakat tentang pelaksanaan program Kotaku dan Evaluasi keberhasilan program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tambaan, dengan adanya penilaian evaluasi ini dapat mengukur sejauh mana program mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan batasan satu Kelurahan Tambaan yang terdampak program KOTAKU.

1.5 Keluaran Penelitian

Keluaran atau output dari penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Kotaku dalam Penanganan Permukiman Kumuh kelurahan Tambaan Kota Pasuruan” diuraikan berdasarkan sasaran yang ingin dicapai dari penelitian ini. Adapun keluaran yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari:

1. Terevaluasinya Pelaksanaan Program Kotaku dalam Penanganan Permukiman Kumuh yang ada di kelurahan Tambaan

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat terkait tujuan, manfaat, dan fungsi Program KOTAKU dalam menangani permukiman kumuh.
2. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam meningkatkan peran pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh.
3. Bagi Pendidikan
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atau rujukan bagi penelitianpenelitian selanjutnya, dalam melakukan evaluasi program penanganan permukiman kumuh.

1.7 Sistematis Pembahasan

Sistematika pembahasan laporan penelitian ini meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka pikir, serta sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Membahas tentang dasar teori yang melandasi penelitian ini, serta penelitianterdahulu yang mendasari penelitian ini sebagai referensi dasar dan dilengkapi dengan landasan peneltian serta sintesa variabel penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Membahas tentang jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis penelitian dalam mencapai tiap sasaran pada penelitian ini.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Membahas tentang gambaran umum Kota Pasuruan, Gambaran umum permukiman Kelurahan Tambaan

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai hasil survey dan analisis data yang terkait dengan perbandingan antara presentase program dan penilaian persepsi masyarakat

BAB VI : KESIMPULAN

Berisikan tentang kesimpulan dan Rekomendasi penelitian

Bagan 1. 1 Kerangka Pikir

